

EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA

*Sitti Yunita Kadir*¹
*Johannis Kaawoan*²
*Johny Lengkong*³

Abstrak

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif, bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku juga pada organisasi yang di maksud yaitu, organisasi badan kesatuan bangsa dan politik atau disingkat dengan Badan Kesbangpol, yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri. Yang dimana merupakan salah satu Direktorat dari Kementrian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, kolupsi dan Nepotisme. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menerapkan dalam pengkajian deskritif kualitatif yang dalam hal ini, lebih mengutamakan pada melihat, mengamati, dan menyelidiki aktivitas kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, dan dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kinerja pegawai yang ada di Kesbangpol, memiliki pencapaian sasaran dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandinganya dengan populasi sudah menunjukkan prensentase yang baik. Hal ini mengindikasikan perjanjian target dapat tercapai dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Pegawai

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif, bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Organisasi juga berisikan orang yang mempunyai aktivitas yang jelas guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini organisasi yang di maksud adalah badan kesatuan bangsa dan politik atau disingkat dengan Badan Kesbangpol merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. Yang dimana merupakan salah satu Direktorat dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 3 ayat 6 yang berbunyi tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang di maksud dari Undang-Undang di atas pemerintah daerah harus dewasa dalam menyikapi segala urusan yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat. Peraturan daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Maluku Utara 2013-2033. Program-program yang tercantum dalam Rencana strategi (RENSTRA) dan rencana kinerja tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD tahunan anggaran 2016, sebagai upaya Badan kesatuan bangsa dan politik dan masyarakat provinsi maluku utara untuk mewujudkan provinsi sebagai provinsi

yang memiliki situasi yang kondusif sehingga menjadi tempat yang aman dalam berinvestasi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, kolupsi dan Nepotisme (KKN) konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan menegerial yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Rencana strategis Badan kesatuan bangsa dan politik dan masyarakat provinsi maluku utara merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinegsis harus selaras dengan visi dan misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas.

Rencana strategis yang berkaitan dengan visi dan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan kesatuan bangsa dan politik dan masyarakat provinsi maluku utara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap 5 (Lima) tahun membuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah. Efektif dan berkesinambungan melalui program dan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 38 Tahun 2009

Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Maluku Utara. Badan kesbangpol mempunyai tugas dan fungsi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik serta mendorong penciptaan keamanan dan ketertiban guna mendukung kehidupan masyarakat yang kondusif untuk pembangunan susunan program kegiatan yang terencana dan terstruktur dan kesinambungan yang baik dan membantu dalam memetakan kondisi masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Rencana strategis pada dasarnya merupakan bagian dari dokumen perencanaan badan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi dasar dan panduan usulan program dan kegiatan setiap tahun anggaran, sehingga sasaran pembangunan dibidang politik, kebangsaan, kesatuan, penyelesaian konflik, pendidikan demokrasi, serta nilai-nilai luhur kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat disusun secara terencana. Berdasarkan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1) Terbangunnya wawasan kebangsaan dan watak bangsa dalam rangka mewujudkan kepribadian bangsa yang memiliki wawasan global.
- 2) Mantapnya pengamalan Pancasila dan tegaknya kedaulatan rakyat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kasatuan Republik Indonesia.
- 3) Terwujudnya proses pembaharuan bangsa dalam memantapkan ketahanan bangsa.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya bela Negara.
- 5) Terpantaunya keberadaan lembaga social sebagai wadah lembaga keswadayaan.

Dalam sebuah organisasi atau yang dalam hal ini merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berisikan mempunyai aktifitas atau tuntutan pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pegawai atau karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugas. Kinerja sumber daya manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dalam organisasi. Hasil kerja yang dimaksud dapat berupa hasil kerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dengan tanggung jawab yang di berikan. Tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, yaitu:

- a. Tugas badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- b. Fungsi dalam pelaksanaan tugas badan kesbangpol dijabarkan melalui fungsi-fungsi sebagai berikut.
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 5. Perumusan kebijakan pengembangan budaya politik, standar nama, pedoman, criteria,

dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik, dan pengembangan budaya politik, serta bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Kinerja juga merupakan unjuk kerja yang dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu syarat untuk tercapainya tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan agar kinerja pegawai dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, hasil kerja pegawai harus dimaksimalkan atau ditingkatkan dengan menerapkan efektifitas di dalam Badan Kesbangpol karena efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diteliti dan ditelaah dalam penelitian yaitu sebagai berikut: Bagaimana efektifitas kinerja pegawai di Kesbangpol Provinsi Maluku utara? Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas kinerja pegawai Kesbangpol Provinsi Maluku Utara.

Tinjauan Pustaka

Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986:48) yang menjelaskan

bahwa :”Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. Pengertian efektif ialah pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternative. Lainnya, jika sesuatu kegiatan atau pekerjaan bisa diselesaikan dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Jika kaitanya dengan proses produksi suatu barang, maka efektif biasa diartikan sebagai pemilihan terhadap bahan baku dan cara produksinya agar menghasilkan barang yang bermanfaat. Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984:24) adalah: “efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input”. Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “Kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuai sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) kinerja atau hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Kinerja menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003:223) kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Maluyu S.P. Hasibun (2001:34) mengemukakan “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menurut Jhon Whitmore (1997:104) kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum”.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini memakai pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menemukan apa yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuktikan apa yang telah ditemukan. Apa yang ditemukan harus dibuktikan dengan kembali kebelakang pada dunia empiris di bawah studi dan menguji sedemikian rupa analisis-analisis darurat yang cocok dengan fenomena dan berfungsi untuk menjelaskan apa yang telah diobservasi (Patton, 1980:47). Glaser dan Strauss (1967:3) menjelaskan apa makna hasil yang cocok dan berfungsi. Dengan cocok kita maknakan kategori-kategori itu harus siap (tidak secara dipaksakan/dibuat-buat) diaplikasikan dan ditunjukkan oleh data di bawah studi; dengan berfungsi (works) kita maknakan bahwa kategori-kategori itu harus sangat relevan dan bisa menjelaskan perilaku di bawah studi. Penemuan dan verifikasi berarti bahwa kategori-kategori itu bergerak ke belakang dan ke depan antara induksi

dan deduksi, antara pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman, dan antara tingkat yang lebih besar dan tingkat yang lebih tinggi daripada inkuiri naturalistik (Patton, 1980:47). Bogdan dan Taylor (1975) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong,2002:3). Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan; subjek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan ini, maka yang menjadi fokus dalam penulisan penelitian ini ialah :Penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui factor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas kinerja pegawai di BadanKesbangpol Provinsi Maluku utara, Yang meliputi :

- a. Efektifitas perencanaan
- b. Efektifitas biaya/anggaran
- c. Efektifitas waktu
- d. Efektifitas mutu/kualitas

Berdasarkan pengamatan atas hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dalam jangka waktu 2 minggu di Kesbangpol Propinsi Maluku Utara maka penulis menetapkan informan antara lain pegawai, kelompok LSM dan kelompok partai politik yang akan dijadikan sebagai informan untuk melengkapi data mengenai penelitian yang kemudian akan dilakukan.

Hasil Penelitian

Efektifitas perencanaan Badan kesatuan bangsa dan politik (Badan kesbangpol) disusun sebagai bagian dari RPJM provinsi maluku utara tahun

2014-2019, yang merupakan suatu kesatuan perencanaan pembangunan jangka menengah dalam mengelola dinamika politik, wawasan kebangsaan, konflik, dan pendidikan demokrasi dan stabilitas sosial di wilayah provinsi maluku utara, sebagai bagian dari dokumen perencanaan RPJM Provinsi maluku utara, Renstra Badan kesatuan bangsa dan politik menyusun program kerja dan kegiatan setiap tahun berdasarkan tugas pokok dan analisa kebutuhan kegiatan setiap 5 tahun kedepan. Sehingga diharapkan impementasi program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun kedepan dapat tersinkronisasi dan berkesinambungan sehingga pelaksanaan visi dan misi daerah dapat tergambar dan bisa terlaksana dalam program perencanaan dan kegiatan. Rencana strategis pada dasarnya merupakan bagian dari dokumen perencanaan badan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi dasar dan panduan usulan program dan kegiatan setiap tahun anggaran, sehingga sasaran pembangunan dibidang politik, kebangsaan, kesatuan, penyelesaian konflik, pendidikan demokrasi, serta nilai-nilai luhur kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dapat disusun secara terencana.

Dalam penyusunan program kegiatan perlu perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kesinambungan dari program dengan tujuan agar dapat diukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembangunan maupun perluasan untuk penyusunan program selanjutnya. Badan kesbangpol mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik serta mendorong penciptaan keamanan dan ketertiban guna mendukung kehidupan masyarakat yang kondusif untuk

pembangunan, susunan program kegiatan yang terencana dan terstruktur dengan kesinambungan yang baik akan membantu dalam memetakan kondisi masyarakat sesuai dengan kondisi transtimbnas yang ada di wilayah tersebut. Dengan memahami peta kondisi masyarakat maka perhatian pemerintah dalam membangun kondisi transtibmas di masyarakat akan tepat pada sasaran. Perhatian utama dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah perkembangan situasi politik di daerah yang akan terus mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum legislative, pemilihan presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota di maluku utara.

Dalam konteks tersebut diharapkan penyusunan dan pengelokasian anggran untuk badan kesatuan bangsa dan politik provinsi maluku utara dapat memperhatikan perkembangan dan dinamika politik dan keamanan di daerah selama 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat sehingga diharapkan penanganan masalah-masalah politik, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berlangsung maksimal untuk menjalin stabilitas daerah, dalam mendukung proses pembangunan di daerah, terutama perkembangan tantangan dan ancaman sehingga dapat diantisipasi dan direspon sedini mungkin dengan berbagai program dan action pembangunan untuk mewujudkan daerah yang kondusif bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan rencana pembangunan, mengamanatkan perlunya dilakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan anggaran yang

hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan serta program /kegiatan tahun berikutnya.sebagaimana amanat dijelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi; penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan .termasuk didalamnya tuntutan adanya penyusunan kegiatan pelaporan secara berkala dan berjenjang baik triwulan maupun tahunan oleh masing-masing kementerian/lembaga, juga unit organisasi dan unit kerja pada masing-masing kemntrian/lembaga. Badan kesatuan bangsa dan politik disusun berdasarkan realisasi keuangan, kinerja dan capaian fisik atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran priode juga merupakan analisis dari seluruh pelaksanaan program/kegiatan yang telah berjalan selama satu tahun anggaran sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan keuangan Negara serta hasil pelaksanaan program kerja.Direktorat jenderal kesatuan bangsa dan politik kementerian dalam negeri provinsi maluku utara. Perencanaan pembangunan pada program pembinaan kesatuan bangsa dan politik badan kesatuan bangsa dan politik kementerian dalam negeri merupakan bagian dari arah kebijakan dalam kontek pembangunan jangka panjang nasional, yang dirumuskan dalam tiga pilar pokok yaitu :

1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik

2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada pronsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas system politik dalam negeri dan seistem pemerintahan dalam negeri; serta
3. Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui tiga pilar tersebut, dirumuskan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian misi pembangunan Nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang aman,damai,adil dan demokratis serta sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, di harapkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata dapat dilaksanakan dengan baik.Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri tersebut menjadi landasan utama bagi upaya peningkatan peran pemerintahan yang lebih resposif terhadap perbaikan kesejahtraan dan pelayanan umum kepada msyarakat. Badan kesatuan bangsa dan politik sebagai salah satu komponen di kementerian dalam negeri merespon arah kebijakan tersebut khususnya dalam rangka stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Perencanaan yang sudah dibuat oleh para manajer dalam segala tingkatan manajemen organisasi dalam periode waktu tertentu mesti ditinjau ulang, apakah masih efektif untuk terus diaplikasikan dalam kegiatan organisasiataukah harus diadakan perubahan, modifikasi, atau bahkan diganti dengan perencanaan yang baru.Untuk meninjau ulang dan menilai suatu perencanaan dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu, sehingga efektivitas perencanaan tersebut tetap terjaga. Fungsi lain dari suatu rencana harus fleksibel,stabil,berkesinambungan

dan sederhana. Fleksibilitas adalah esensi bagi kesuksesan perencanaan strategic. Rencana juga sangat membutuhkan stabilitas, karena bila rencana terlalu sering berubah para pegawai tidak terbiasa dengan rencana tersebut sebagai sesuatu peralatan pengoprasian dan menjadi tidak efektif rencana juga perlu mempunyai kontinuitas, agar perencanaan dapat berkesinambungan. Rencana mesti sederhana untuk memberikan cara pencapaian tujuan dengan sedikit mungkin faktor-faktor, kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh dalam situasi, serta hubungan-hubungan antara pegawai lainnya. Rencana-rencana juga harus di evaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen hanya akan efektif jika didasarkan atas informasi yang tepat dan didasarkan pada pemikiran realistic dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dibanding saran pribadi pembuat rencana agar perencanaan tersebut dapat tercapai. Proses penyusunan harus didasarkan atas pemikiran yang objektif. Manajemen kinerja juga merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan para individu dengan mengelola kinerja sesuai dengan tujuan, sasaran dan standar yang telah disepakati bersama. Manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan untuk memperjelas dan menyepakati fungsi pokok pekerjaan bawahan dan pelaksanaannya guna berkontribusi mencapai tujuan organisasi, manajemen kinerja bukanlah proses satu arah dari atas kebawah, melainkan proses interaktif dimana terjadi dialog dan diskusi antara atasan dan bawahan

berkenaan dengan target pekerjaan bawahan.

Untuk itu, manajemen kinerja memiliki lima komponen sebagai berikut :

1. Perencanaan kerja dimana atasan dan bawahan berupaya merumuskan, memahami dan menyepakati target kinerja bawahan dalam rangka mengoptimalkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi;
2. Komunikasi berkelanjutan antara atasan dan bawahan guna memastikan bahwa apa yang telah, sedang dan akan dilakukan bawahan mengarah pada target kinerjanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta guna mengantisipasi segala persoalan yang mungkin timbul;
3. Pengumpulan data dan informasi oleh masing-masing pihak sebagai bukti pendukung realisasi kinerja bawahan. Pengumpulan dapat dilakukan melalui formulir penilaian kinerja, observasi langsung maupun tanya jawab dengan pihak-pihak terkait;
4. Pertemuan tatap muka antara atasan dan bawahan untuk mengkaji bukti-bukti otentik kinerja bawahan diklarifikasi, didiskusikan dan disimpulkan bersama sebagai kinerja bawahan pada periode tertentu;

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Efektivitas biaya perencanaan adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional. Jadi jangan lakukan perencanaan bila hasilnya tidak meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya lebih kecil daripada biaya perencanaan dan implementasinya. Dari sisi penganggaran Badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi maluku utara bersifat fluktuatif ini dikarenakan adanya beberapa program serta kegiatan yang tidak bisa diakomodir secara berkala setiap tahun anggarannya, berikut jumlah alokasi anggaran 2009-2013 beserta serapannya sebagai berikut: Permasalahan lain adalah belum terintegrasinya antara perencanaan dan penganggaran sehingga tidak sinkron antara rencana kerja anggaran (RKA) dengan penganggaran oleh biro keuangan daerah, sehingga perencanaan yang telah disusun dengan baik dengan sendirinya akan hilang setelah masuk dalam tahap penganggaran nanti. Diperlukan satu system yang terpadu antara perencanaan, penganggaran serta pengawasan sehingga semua program kegiatan dapat terlaksana sekaligus dapat di monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya

Untuk meningkatkan kualitas atau mutu guna menyeleraskan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi maluku utara maka Badan kesatuan bangsa dan

politik dalam hal menangani masalah dan problem yang dimasyarakat serta menjaga stabilitas kondisi sosial politik, maka perlu adanya peningkatan koordinasi antara insitansi perencanaan dengan pemegang otoritas politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas dalam menjelaskan program pembangunan dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan daerah kedepan khususnya di bidang sosial politik dan keamanan dibangun dalam karangka NKRI dengan memperhatikan keanekaragaman dan kekayaan budaya local sebagai bagian dari mewujudkan provinsi maluku utara yang agamis, sehat cerdas produktif dan sejahtera. Kondisi ini akan diwujudkan bila kondisi sosial politik, keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif dan sejahtera. Kondisi, karena sangat tidak mungkin membangun maluku utara yang sejahtera dalam kondisi politik yang tidak stabil, hal ini yang kemudian harus menjadi perhatian seluruh stake holder di provinsi maluku utara.

organisasi. Hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, kuantitas dan ketetapan waktu. Kemudian mengukur sejauh mana kinerja pegawai, Dharma (2002;355) menyatakan pengukuran kinerja pegawai dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai, pengukuran kuantitatif melibatkan penghitungan keluar dari proses pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah yang keluar
- b. Kualitas, yaitu sesuatu yang dihasilkan (baik atau tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran tingkat

kepuasan kerja pegawai dalam suatu instansi yaitu seberapa baik penyelesaiannya.

- c. Ketetapan waktu, sesuai tidaknya dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen atau instansi yang direncanakan ketetapan waktu merupakan cermin dari pengukuran kuantitatif yang menentukan penyelesaian waktu kegiatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini pemerintah selalu di tuntut agar dapat memberikan sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam arti dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat sasaran dan terutama mampu memberikan rasa puas kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Namun agar dapat mewujudkan hal tersebut di butuhkan kinerja yang serius dan sungguh-sungguh dari aparatur pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban melayani masyarakat.

Untuk dapat melihat bagaimana kinerja aparatur pemerintah tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang prima, di perlukan indikator pengukur kinerja aparatur pemerintah. Penggunaan indikator pengukur kinerja merupakan salah satu cara untuk dapat lebih mudah mengetahui dan mengamati sudah sejauh mana keberhasilan dari proses penyelenggaraan pemerintahan pada proses pelayanan publik. Salah satu indikator pengukur kinerja aparatur pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah proses ketepatan waktu. Boediono, (2003 : 69) mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan ketepatan waktu adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas jelas diketahui bahwa proses ketepatan waktu sangat

penting untuk di terapkan dalam melakukan setiap pekerjaan agar dapat tercapai sebuah hasil yang maksimal dan target yang telah di tentukan sebelumnya. Kemudian penggunaan waktu yang tepat dan baik dapat mempermudah dalam proses perencanaan pengorganisasian karena, waktu merupakan salah satu sumber daya untuk melakukan sebuah pekerjaan dan untuk dapat mencapai target yang telah di tentukan sebelumnya oleh organisasi atau insatansi yang bersangkutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari seluruh pertanyaan yang diajukan dalam wawancara kepada informan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas yang meliputi perencanaan dan biya/anggaran di badan kesatuan bangsa dan politik sudah sangat baik untuk penyusunan rencana, penetapan rencana harus terus memalukan pengendalian ,pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan anggaran yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan serta program /kegiatan tahun berikutnya.sebagaimana amanat dijelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu tahapan dalam perencanaan
2. Kinerja pegawai adalah suatu yang dicapai oleh pegawai, prestasi yang diperlihatkan oleh para pegawai dan kemampuan kerja yang beerkaitan dengan penggunaan peralatan kantor atau dapat dilihat dari Tugas pokok dan fungsi dari badan kesatuan bangsa dan politik provinsi maluku utara.
3. Pada beberapa capaian sasaran dinilai berhasil dapat dilihat dari

capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi sudah menunjukkan presentase yang baik. Hal ini mengindikasikan perjanjian target dapat tercapai dengan baik.

4. Sebagian besar program menunjukkan capaian kerja yang baik, terutama pada indikator kinerja outcome maupun indikator kinerja output. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.

Saran

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara perlu adanya akses jaringan internet dalam memenuhi kebutuhan kerja pegawai, dan perlunya pengadaan gedung.
2. Meningkatkan kuantitas pegawai dalam pelatihan-pelatihan dan diklat yang diberikan.
3. Meningkatkan kualitas kerjasama pegawai dengan mengembangkan pola komunikasi, lingkungan yang harmonis dan transparan.
4. Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara masih membutuhkan peningkatan kuantitas tenaga dalam pelayanan bidang kesatuan bangsa, kapasitas sumber daya aparatur menentukan kapasitas instansi.
5. Meningkatkan Kinerja pegawai lewat evaluasi kinerja pegawai, meningkatkan kecepatan kerja lewat pelatihan-pelatihan teknis, dan pembagian tugas kerja secara professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. E. 2003. Public Policy Making, Fifth Edition. USA: Houghton Mifflin Company.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Aripin, S. 2009. Pengaruh Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik Untuk Guru Terhadap Kompetensi Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Disertasi.

Universitas Padjadjaran. Bandung.

Edwards, George C. III. 1998. Implementing Public Policy. Washington DC: Texas A & M University. Congressional Quarterly Press.

Grindle, S, M. 1980. Politics and Policy Implementation. New Jersey. Princeton University Press.

Hill, M and P. Hupe. 2002. Implementing Public Policy. London. SAGE Publications.

Hogwood, Brian W. dan L. A. Gunn., 1984. Policy Analysis For The Real World. Oxford University Press. New York.

Indiahono, D. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Kodoatie, Robert J. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.

Mazmanian, D. A. dan Sabatier. P. A. 1983. Effective Policy Implementation. Lexington. Ky: Lexington Books.

Saefullah, H.A.D. 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD.

Subarsono, Ag. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sujarweni. V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke – 21.
- Suwerda, B. 2012. Bank Sampah : (Kajian Teori dan Penerapan). Penerbit Pustaka Rihama. Yogyakarta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Van M. D dan Van H. C. E. 1975. The Policy Implementation Process ; a conceptual framework. Administration and Society. 6 : 4 ; 445-88.
- Wahab, Solichin A. 2005. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara
- Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service)